Jurnal Pustaka Dianmas, Vol 6, No. 1 (Juni 2026), Hal. 115-128
DOI: doi.org/10.32509/dianmas.v6i1.7720

Pendampingan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Kelompok Wanita Tani Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

Nur Muhamad Iqbal

Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten

*Email Korespondensi: n.muhamadiqbal@umj.ac.id

Abstract *- The Women Farmers Group (KWT) in Daon Village, Rajeg Subdistrict, has great potential in fostering the village economy but is hindered by weak institutional governance and a non-functional organizational structure. This Community Service (PkM) activity aims to provide structured mentoring in strengthening institutional governance and educating administrators on transparent, accountable, and participatory management principles. The implementation method used the Participatory Action Research (PAR) approach, involving 15 KWT administrators and members through interactive workshops and Focus Group Discussions (FGD). The results showed an increase in participants' understanding of the urgency of business group institutions and good governance principles. Through the FGD session, KWT Desa Daon successfully formulated a comprehensive organizational structure, including clear job descriptions from the chairperson level to operational sections such as production and marketing. This governance strengthening directly implies an increase in member capacity, transparent financial management, and the readiness of KWT to transform into a bankable rural micro-enterprise. In conclusion, this mentoring successfully laid an organized institutional foundation to drive KWT independence and improve the economic resilience of Daon Village.*
Keywords: *Governance; Institution; Women Farmers Group; Economic Empowerment; Daon Village.*

Abstrak - Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Daon, Kecamatan Rajeg memiliki potensi besar dalam menumbuhkan ekonomi desa, namun terhambat oleh lemahnya tata kelola kelembagaan dan struktur organisasi yang belum fungsional. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terstruktur dalam menguatkan tata kelola kelembagaan serta mengedukasi pengurus mengenai prinsip pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan 15 pengurus dan anggota KWT melalui tahapan workshop interaktif dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai urgensi kelembagaan kelompok usaha dan prinsip tata kelola yang baik. Melalui sesi FGD, KWT Desa Daon berhasil merumuskan struktur organisasi yang komprehensif, mencakup pembagian tugas (Tupoksi) yang jelas dari tingkat ketua hingga seksi operasional seperti produksi dan pemasaran. Penguatan tata kelola ini berimplikasi langsung pada peningkatan kapasitas anggota, transparansi pengelolaan keuangan, serta kesiapan KWT bertransformasi menjadi usaha mikro pedesaan yang layak bermitra (bankable). Kesimpulannya, pendampingan ini berhasil meletakkan fondasi kelembagaan yang terorganisir guna mendorong kemandirian KWT dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Daon.
Kata Kunci: Tata Kelola; Kelembagaan; Kelompok Wanita Tani; Pemberdayaan Ekonomi; Desa Daon

PENDAHULUAN

Kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di tingkat desa seharusnya sudah memiliki konsep untuk bertransformasi dari sekadar wadah perkumpulan masyarakat desa menjadi motor penggerak utama bagi tumbuhnya entitas usaha mikro desa. Melalui pengorganisasian yang terstruktur, KWT memfasilitasi perempuan pedesaan untuk tidak hanya berfokus pada kegiatan aktivitas formalitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa tetapi

ISSN 2798-057X (Online)
Submitted: 07-28-2026, Accepted: 08-10-2026, Published: 08-11-2026
CC BY-NC-SA 4.0. Copyright © [2026] The Author(s).

juga didorong untuk melakukan diversifikasi dan hilirisasi pengolahan produk potensi desa yang memiliki nilai tambah ekonomis tinggi (Sugiarti, 2022). Secara empiris di berbagai negara berkembang, pelibatan kelembagaan perempuan secara kolektif dalam ekosistem kewirausahaan pedesaan terbukti efektif dalam mengatasi kendala klasik seperti keterbatasan akses modal, informasi pasar, dan teknologi yang selama ini sering meminggirkan peran ekonomi perempuan (Farnworth, 2023; Quisumbing, 2021).

Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang memiliki wilayah dengan luas 4,92 km² dan jumlah penduduk 12.993 jiwa. Memiliki 33 RT dan 8 RW dengan mata pencaharian masyarakat didominasi sektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga berbasis hasil pertanian. Rentang pendidikan masyarakat Desa Daon yang tamat SD/sederajat mencapai ±672 orang, sedangkan penduduk dengan pendidikan sarjana (S1–S3) hanya ±243 orang. Selain itu, terdapat sekitar ±365 kepala keluarga yang tidak atau belum bekerja. Dengan kondisi seperti ini, usaha mikro yang dijalankan oleh KWT harapannya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan mampu memberikan pembiayaan penghidupan bagi masyarakat Desa Daon, tentu dengan tata kelola kelembagaan yang lebih konsisten dan profesional. Kondisi kelembagaan yang rapuh ini menyebabkan KWT Desa Daon rentan mengalami stagnasi. Bantuan fisik atau modal yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta seringkali tidak berkelanjutan karena tidak diimbangi dengan kapasitas manajerial yang memadai (Christin & Rahayu, 2017).

Permasalahan KWT di Desa Daon memiliki beberapa kendala dalam pengembangan lembaga perkumpulan perempuan desa dan menjadi salah satu penggerak utama dalam meningkatkan ekonomi desa. KWT Desa Daon yang saat ini ada diketahui merupakan pembentukan organisasi atas kebutuhan desa dalam mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan ekonomi, sebelumnya pengurus dan anggota KWT tidak memiliki peran aktif partisipasi dalam menjalankan organisasi KWT dengan beberapa kendala yang dihadapi seperti pelatihan dan pengembangan produk usaha, modal, bahan baku, sarana, pembagian tugas yang komitmen dan partisipasi aktif anggota. karena itu, KWT dibentuk kembali seiring adanya Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) dalam menangani kemiskinan ekstrem di 10 Desa, Kabupaten Tangerang (Kab.Tangerang, 2025).

Keberadaan KWT Desa Daon yang saat ini dimiliki seharusnya menjadi peran sentral dalam pengembangan potensi lokal dan berupaya aktif menghasilkan produk lokal berdaya saing global. Setelah dilakukan observasi dan wawancara awal diketahui bahwa struktur organisasi KWT belum memiliki tugas dan fungsi untuk masing-masing anggotanya, sehingga kehadiran KWT belum dapat optimal karena secara tata kelola kelembagaan belum bisa dijalankan. karena itu, pendampingan workshop dan FGD perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi desa sebagai salah satu tujuan keberadaan KWT di setiap desa. Sebuah kelembagaan usaha seharusnya bukan sekadar kumpulan orang, melainkan merujuk pada adanya aturan main, norma, dan struktur yang jelas dalam sebuah kelompok. Penguatan aspek manajerial kelembagaan, seperti perumusan legalitas aturan main internal dan transparansi administrasi pembukuan, merupakan prasyarat mutlak agar KWT memiliki status yang layak sehingga mampu mengakses pembiayaan eksternal serta menjalin kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pihak swasta (Rahman, 2021).

Lebih lanjut, sistem tata kelola kelembagaan yang partisipatif dan profesional akan meningkatkan rasa kepemilikan anggota, mencegah konflik internal, serta menjamin regenerasi kepengurusan usaha agar tidak bergantung pada figur tertentu saja (L. , & S. F. Wahyuni, 2025). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KWT adalah langkah fundamental agar inisiatif ekonomi warga tidak berhenti sebagai proyek sosial sesaat, melainkan berkembang menjadi korporasi mikro desa yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ketiadaan tata kelola yang

terorganisir menyebabkan KWT kesulitan untuk berkembang. Tata kelola kelembagaan memiliki urgensi yang krusial, di antaranya untuk memberikan arah yang jelas guna mencegah konflik dan menyatukan visi, serta memastikan keberlanjutan roda bisnis kelompok meskipun terjadi pergantian kepengurusan (Mulyanah et al., 2025). Diketahui hasil obervasi yang dilakukan bahwa tim KWT Desa Daon belum memiliki struktur organisasi yang mampu mengembangkan usaha mikro, namun begitu. Ketua, Sekretaris dan Bendahara sudah dibentuk sebagai kehadiran organisasi KWT dalam perangkat Pemerintah Desa Daon (Al Nido et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya menemukan bahwa faktor penentu keberhasilan KWT bukanlah besaran bantuan dana awal, melainkan kohesivitas kelompok dan kejelasan aturan main internal. KWT yang memiliki dokumen tata tertib tertulis terbukti 60% lebih tangguh dalam menghadapi fluktuasi harga pasar dibandingkan KWT yang tidak memilikinya (Suryani, 2021). Selain itu, ada yang menyimpulkan bahwa dimensi pemberdayaan yang paling sering tertinggal pada perempuan pedesaan adalah 'kepemimpinan dan pengaruh di masyarakat'. Hal ini terjadi karena minimnya akses perempuan terhadap pelatihan manajerial (Doss et al., 2018). Oleh karena itu, program PkM ini dirancang tidak hanya untuk memperbaiki pembukuan, tetapi juga memberikan pelatihan kepemimpinan bagi pengurus KWT Desa Daon agar mereka mampu bernegosiasi dengan pemangku kepentingan.

Kegiatan pengabdian (aljihad & wibowo, 2022; Rusli et al., 2022) berfokus pada pelatihan administrasi dan literasi keuangan untuk UMKM berbasis pertanian. Hasil pengabdian tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 75% setelah diberikan intervensi berupa pendampingan berbasis *learning by doing* menggunakan aplikasi pembukuan sederhana. Pendekatan mentoring partisipatif ini akan diaplikasikan di KWT Desa Daon, di mana tim PkM tidak sekadar memberikan teori, tetapi langsung memandu praktik pencatatan kas harian. Terakhir (Monica & Ratna, 2023; Pratiwi, 2023) dalam studinya mengenai tata kelola (*governance*) kelembagaan petani di Indonesia menemukan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah prasyarat mutlak untuk mencegah konflik internal di dalam kelompok tani. Konflik internal merupakan penyebab utama bubarnya 40% KWT di tahun ketiga mereka berdiri. PkM ini akan mengisi celah tersebut dengan menanamkan nilai-nilai *Good Governance* dalam pelaksanaan tata kelola kelembagaa KWT.

Konsep tata kelola diadopsi dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditransformasi untuk skala lembaga pedesaan/koperasi. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), tata kelola yang baik bertumpu pada lima prinsip utama yang sering disingkat TARIF (*Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness*) (Pratiwi, 2023). Dalam implementasinya TARIF di KWT Desa Daon dapat dilaksanakan dalam bentuk Transparansi (Keterbukaan) untuk memastikan KWT memiliki mekanisme keterbukaan informasi, terutama terkait aliran dana (iuran anggota, bantuan pemerintah, hasil penjualan) agar dapat diakses oleh seluruh anggota secara periodik. Kedua Akuntabilitas (Kejelasan Fungsi): Membangun kejelasan struktur organisasi, di mana ketua, bendahara, sekretaris, dan koordinator bidang memiliki peran kerja (Tupoksi) yang terdefinisi secara jelas, sehingga kinerja mereka dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga Responsibilitas (Pertanggungjawaban): Kepatuhan KWT terhadap peraturan perundang-undangan, norma yang berlaku di masyarakat, serta aturan internal yang disepakati bersama. keempat Independensi (Kemandirian): Keadaan di mana KWT dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan bebas dari intervensi atau tekanan sepihak dari individu atau kelompok tertentu. Terakhir, kelima pada prinsip Kewajaran dimana pengurus KWT dapat menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh anggota dalam memenuhi hak dan kewajibannya, termasuk dalam sistem bagi hasil usaha kelompok.

Berdasarkan paparan diatas menunjukan bahwa tata kelola kelembagaan dalam pengembangan usaha mikro KWT menjadi perhatian penting untuk dijalankan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Adapaun tujuan kegiatan PkM adalah (1) Memberikan pendampingan terstruktur untuk menguatkan kelembagaan dan menyusun struktur organisasi yang jelas pada KWT Desa Daon (2) Mengedukasi pengurus dan anggota KWT mengenai prinsip pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna mendukung kemandirian kelompok.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berjudul "Pendampingan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Kelompok Wanita Tani Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang" ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menitikberatkan pada pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima program (Suprihandari et al., 2025). Secara operasional, metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang dalam bentuk Workshop interaktif yang dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan struktur organisasi KWT. Rangkaian kegiatan ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap awal berfokus pada observasi lapangan, identifikasi masalah kelembagaan, dan koordinasi perizinan dengan perangkat Desa Daon. Pada tahap ini, menetapkan sasaran strategis kegiatan, yaitu para pengurus dan anggota aktif Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Daon yang berjumlah 15 orang. Penetapan jumlah peserta ini dinilai ideal untuk sebuah kegiatan berbasis pendampingan intensif, di mana efektivitas komunikasi dan interaksi antar fasilitator dan peserta dapat terjaga secara optimal (Retnowati et al., 2022).

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti PkM yang diselenggarakan secara tatap muka bertempat di Aula Kantor Desa Daon. Pemilihan kantor desa sebagai lokasi kegiatan bertujuan untuk memberikan legitimasi formal. Kegiatan ini terbagi menjadi dua sesi, diawali dengan workshop berupa pemaparan materi secara komprehensif kepada 15 anggota KWT. Materi yang disampaikan berfokus pada kelembagaan kelompok usaha (konsep, urgensi, dan prinsip pengelolaanya untuk pertumbuhan bisnis. Penyampaian materi menggunakan pendekatan *Adult Learning* (Andragogi), di mana fasilitator menggunakan bahasa yang aplikatif, contoh kasus nyata di lapangan, serta alat bantu visual agar materi kelembagaan yang cenderung teoretis dapat mudah dipahami oleh ibu-ibu KWT (Lestari et al., 2023).

Sesi kedua berupa *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan memfasilitasi peserta dalam mengidentifikasi kondisi kelembagaan KWT serta merumuskan solusi bersama. Melalui FGD, peserta menyusun visi dan misi organisasi, struktur kepengurusan, pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta rencana kerja organisasi. Pendekatan partisipatif ini memberikan ruang bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan secara musyawarah sehingga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil yang disepakati bersama (Jatnika et al., 2024).

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program pendampingan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan KWT. Evaluasi menggunakan pendekatan pre-test dan post-test**,** lembar observasi, serta kuesioner penilaian peserta. Pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep tata kelola organisasi, struktur kelembagaan, pembagian tugas pengurus, serta penyusunan program kerja. Lembar observasi digunakan untuk menilai tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, sedangkan kuesioner digunakan untuk memperoleh umpan balik mengenai kualitas materi, metode pendampingan, dan manfaat program.

Indikator keberhasilan program meliputi: (1) sedikitnya 80% peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendampingan; (2) terjadi peningkatan nilai rata-rata post-test dibandingkan pre-test minimal 20%; (3) tersusunnya dokumen kelembagaan KWT yang mencakup visi dan misi organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (tupoksi), draft laporan keuangan, dan program kerja (produk yang ingin dihasilkan); serta (4) meningkatnya tingkat partisipasi dan pemahaman peserta terhadap tata kelola organisasi berdasarkan hasil observasi dan kuesioner evaluasi.

Pengukuran peningkatan kapasitas organisasi dilakukan dengan membandingkan kondisi kelembagaan sebelum dan sesudah pendampingan berdasarkan empat aspek utama, yaitu: (1) struktur organisasi, yang diukur melalui keberadaan struktur kepengurusan dan kejelasan pembagian tugas; (2) tata kelola organisasi, yang diukur melalui tersusunnya visi, misi, aturan organisasi, dan program kerja; (3) kapasitas sumber daya manusia, yang diukur melalui peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan hasil pre-test dan post-test; serta (4) partisipasi anggota, yang diukur melalui tingkat keterlibatan peserta dalam proses diskusi, pengambilan keputusan, dan penyusunan dokumen kelembagaan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas program pendampingan dalam memperkuat tata kelola kelembagaan Kelompok Wanita Tani Desa Daon.

HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang telah diselenggarakan pada Selasa, 14 Juli 2026 bertempat di Kantor Pemerintah Desa Daon, dilaksanakan dalam bentuk Workshop pendampingan dan FGD kepada pengurus dan anggota KWT sebagai bagian dalam penguatan tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan ekonomi desa. Kegiatan ini dihadiri oleh 15 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota KWT dilaksanakan di kantor Desa Daon. Partisipasi masyarakat sangat antusias terlihat dari berbagai pertanyaan yang ditanyakan selama sesi berlangsung.

Pelaksanaan Workshop pendampingan dilakukan dengan metode interaktif dan kelompok guna meningkatkan partisipasi anggota dan pengurus KWT terhadap permasalahan yang terjadi di organisasi KWT, sebelumnya hasil observasi dan wawancara tatap muka ditemukan bahwa KWT memiliki dua organisasi yang berbeda dikarenakan kebutuhan administratif dalam pengelolaan pemerintah desa (I. Islami & Sungkono, 2024). hal ini menjadi rumusan masalah dalam membangun tata kelola lembaga KWT guna tercipta organsiasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan ekononmi desa. Penyampaian materi dalam kegiatan workshop pendampingan ini dengan beberapa sub materi pertama mengenal apa itu kelembagaan? materi ini disampaikan guna memahami secara mendasar tentang pengertian dan wadah resmi dalam tata kelola kelembagaa di KWT, sekumpulan perempuan yang berkumpul dalam satu wadah resmi bukan sekedar perkumpulan biasa tapi memili visi dan misi organisasi yang menjadi tujuan perkumpulan KWT ini dibangun (D. I. Islami, 2024). sehingga pengurus KWT bisa memahmi peran fungsi masing-masing pengurus dalam kelembagaan KWT ini.



Gambar 1. Materi Paparan PkM (Sumber dibuat oleh penulis, 2026)

Gambar 1 merupakan bahan materi yang disampaikan saat kegiatan workshop pendampingan kepada pengurus dan anggota KWT Desa Daon, materi tersebut disesuaikan berdasarkan kebutuhan hasil observasi yang dilakukan oleh tim bahwa secara kelembagaan dan struktur organsiasi KWT masih belum dianggap efektif secara organisasi.

"*KWT ini baru dibentuk kembali atas kebutuhan pemerintah desa, karena KWT sebelumnya tidak aktif. makanya kami bentuk kembali*"

Hal tersebut menjadi temuan, bahwa tata kelola kelembagaan KWT masih belum optimal terbukti adanya pembentukan kembali atas kebutuhan dari pemerintah desa tersebut. pembentukan KWT bukan menjadi alasan untuk tidak dapat berkembang dalam menumbuhkan ekonomi desa, karena itu terbentuk atas kebutuhan desa dan kita sadari bukan atas keresahan dan tujuan bersama untuk membangun desa. Workshop pendampingan ini menyadarkan bahwa terbentuknya KWT harus disadari sebagai bagian dalam tata kelola kelembagaan untuk membangun visi dan misi bersama dalam menumbuhkan ekonomi desa lewat berbagai produk pilihan dan potensi desa yang dimiliki.

Gambaran umum organisasi KWT sebelum dilaksanakannya workshop pendampingan dan FGD belum terbentuknya struktur organisasi yang jelas bahkan tugas dan fungsi yang menjadi acuan dan pelaksanaan kelembagaan tersebut hanya dipahami sebagai pembagian dalam program yang diberikan bukan dalam struktur organiasi. Karena itu, pemahaman dalam tata kelola kelembagaan KWT hanya dipahami sebagai pemberian program untuk menjalanka roda organisasi. Peran perempuan dalam kelembaga di desa harus dapat memiliki pemahaman organisasi yang jelas dalam menjalan KWT untuk meningkatkan ekonomi desa. Berikut perbedaan sebelum dan setelah dilaksanaan PkM ini.

Tabel 1 Kondisi Sebelum dan Setelah PkM (Diolah Oleh Penulis, 2026)

No	Indikator/Aspek	Kondisi KWT Sebelum PkM	Kondisi KWT Setelah PkM
1	Struktur Ogrnisasi	Belum memiliki struktur organisasi yang cukup jelas; hanya memiliki ketua saja	Terbentuknya struktur organisasi yang definitif dan komprehensif, mencakup Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Bagian Pemasaran,

			serta Seksi Teknis (Produksi, Sarpras, dan Packing).
2	Kejelasan (Tupoksi)	Belum ada peran dan fungsi dalam pembagian tugas yang jelas	Tersusunnya tugas dan fungsi dari setiap bagian dalam organisasi KWT dan memahami secara sadar dan tanggung jawab
3	Pemahaman Tata Kelola	Organisasi KWT hanya untuk pelaksaan program yang diberikan oleh Pemerintah Desa	Mempunyai komitmen untuk menghasilkan produk dari hasil potensi desa yang dimiliki
4	Partisipasi Anggota	Tidak ada keterlibatan aktif oleh anggota/pengurus KWT	Memiliki kesadaran untuk meningkatkan sesama anggota agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan KWT
5	Sistem Administrasi & Keuangan	Tidak ada catatan/laporan keuangan kas; ada kecurigaan dan konflik internal antaranggota.	Sudah memiliki pemahaman terhadap pentingnya laporan keuangan yang dimiliki KWT termasuk aset juga

Dari hasil tabel yang diolah penulis, menunjukan ada perbedaan yang cukup siginifikan setelah dilaksanakannya Pengabdian Masyarakat kepada pengurus dan snggota KWT di Desa Daon, perubahan atas pemahaman dan komitmen tersebut dilakukan melalui kegiatan workshop pendampingan dan FGD kepada pengurus dan anggota KWT. ada peningkatan pemahaman yang dialami oleh peserta kegiatan melalui hasil post test yang dilakukan, sebesar 20% pengurus dan anggota memahami tugas dan fungsi KWT bukan hanya fokus pada tahap produksi saja, karena itu tidak ada yang mengurusi sial bahan baku yang nanti akan diproduksi, bagaimana pemasaran yang dilakukan dan laporan keuangannya sudah sejauh mana. ini yang menjadi perubahan pemahaman bahwa tata kelola kelmbagan bukan hanya sebatas menjalankan program dari pemerintah tetap menjalan roda organisasi KWT.

Prinsip Pengelolaan Kelompok

Prinsip Pengelolaan Kelompok pada Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Daon menjadi wadah pemberdayaan perempuan perdesaan, untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan KWT dibutuhkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang berakar pada kearifan lokal sekaligus manajemen modern. KWT Desa Daon harus mampu konsisten dalam menerapkan prinsip partisipatif (Nilamsari et al., 2024). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingginya keterlibatan anggota dalam setiap tahapan program, mulai dari musyawarah perencanaan komoditas yang akan ditanam, terbentuknya susunan organisasi KWT, adanya transparansi dalam proses pelaksanaan, akuntabilitas yang menjadi dasar terbentuknya KWT, hingga evaluasi kegiatan. Pendekatan gotong royong ini meminimalisasi dominasi segelintir pengurus dan menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang kuat di antara para anggota (Hermawan, 2025).

Pada aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan kelompok. Dana yang bersumber dari iuran anggota, kas kelompok, maupun bantuan stimulan dari pemerintah desa dikelola secara terbuka. Pembukuan dilaporkan secara berkala dalam pertemuan rutin, sehingga mampu menumbuhkan dan menjaga tingkat kepercayaan anggota terhadap roda organisasi. Aspek keterbukaan ini bukan hanya pada pengelolaan keuangan tetapi harus bisa mampu memberikan segala informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi KWT, keterbukaan informasi ini menjadi akses penting bagi pengurus

untuk dianggap terus terlibat dalam proses organisasi. semakin seseorang tidak pernah mendapat informasi rasa memiliki terhadap sebuah organisasi semakin kecil karena dianggap tidak memiliki peran.



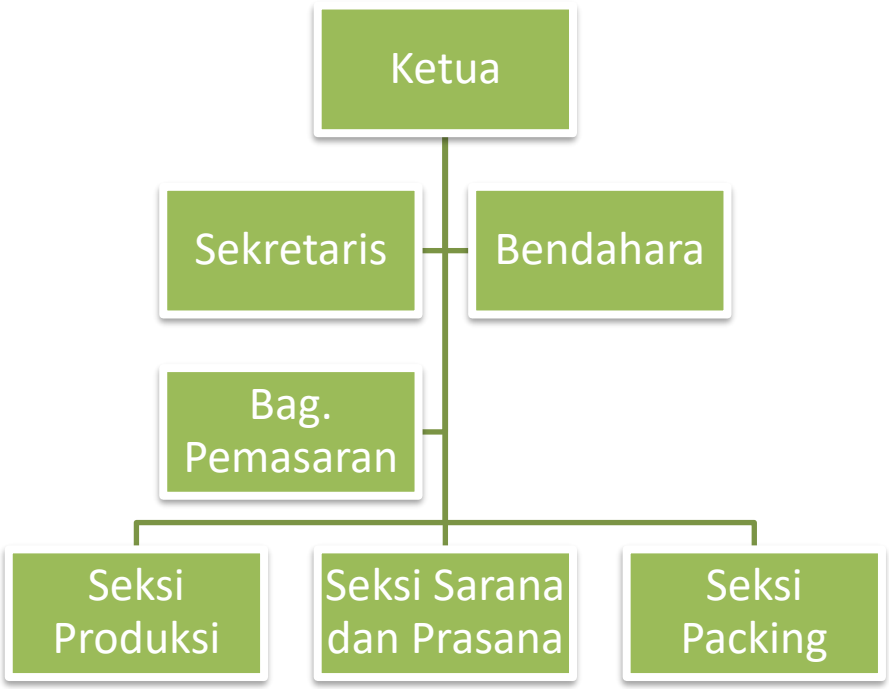
Gambar 2. Pemaparan Materi PkM (Dokumentasi penulis, 2026)

Gambar 2 menunjukan proses pemaparan materi yang dilakukan oleh penulis tentang tata kelola kelembagaan, dalam penyampaian tersebut, penulis menjelaskan bahwa prinsip pengelolaan kelompok dalam hal ini adalah KWT memiliki 3 (tiga) prinsip utama dalam mendukung tata kelola kelambagaa guna mengoptimalkan peran KWT dalam membangun desa dan menumbuhkan ekonomi desa. Pertama Partisipatif, ditemukan bahwa keterlibatan pengurus dan anggota KWT dalam meningkatkan produk hasil produksi KWT belum melibatkan berbagai elemen masyarakat desa yang memiliki kompetensi dalam memproduksi produk potensi desa, hal tersebut dialami karena kesibukan dan keterbatasan waktu anggota KWT untuk terlibat secara aktif.

Kedua Transparansi, menjadi bagian dalam prinsip tata kelola kelembagaan dalam penyampaian materi yang dilakukan, transparasi dalam yang dimiliki oleh KWT Desa Daon adalah keterbukaan informasi terhadap kendala yang dialami selama proses produksi hingga pemasaran yang menjadi masalah. Keterbukaan informasi tersebut menimbulkan permasalahan yang dihadapi oleh KWT yaitu produk yang diperjual belikan tidak bertahan lama dan kualitasnya menurun sepanjang waktu berjalan. Ini temuan yang dihasilkan saat proses pemaparan materi oleh penulis. Ketiga Akuntabilitas, seperti tanggung jawab pengurus KWT dalam menjalankan organisasi ini harus memiliki peran dan fungsi yang harus dijalankan guna meningkatkan ekonomi desa, temuan dari workshop pendampingan ini bahwa masing-masing pengurus sudah memiliki peran dan fungsi sebelumnya dalam menjalankan sebauh produk hasil dari potensi desa, namun memiliki kendala pada bagian pemasaran yang belum mampu bisa memasarkan produk lebih luas serta kualitas produk yang tidak diminati oleh masyarakat desa.

FGD yang dilakukan setlah materi secara keseluruhan disampaikan termasuk “prinsip pengelolaan kelompok” sebagai bagian yang terpenting dalam tata kelola kelembagaan KWT. Dalam FGD ini dipimpin oleh mahasiswa yang mendampingi penulis, tujuan pertama dalam FGD ini menjelaskan peran dan fungsi pengurus dalam organisasi KWT selain itu dibentuk struktur organisasi KWT berdasarkan aspirasi anggota KWT yang hadir dalam workshop pendampingan ini. Dimulai dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bagian

Pamasaran, Anggota yang terdiri dari seksi produksi, seksi sarana dan prasarana, dan seksi Packing (Membungkus. Adapun secara peran dan fungsi serta bagan organisasi KWT Desa Daon dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 3, Bagan Struktur Organisasi KWT Desa Daon
(Sumber dioleh penulis, 2026)

Gambar 3 menjelaskan struktur organisasi KWT Desa Daon setelah dilakukan proses workshop pendampingan dan FGD yang dilakukan guna menentukan lebih efektif struktur organisasi tersebut. Peran dan fungsi dan masing-masing struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Ketua memiliki tugas utama Memimpin, mewakili kelompok ke pihak eksternal, merumuskan program, dan memimpin rapat rutin. Fokus dan tanggung jawabnya adalah strategi, pengambilan keputusan, dan koordinasi umum. Sekretaris Mengelola jalannya administrasi, mencatat notulensi rapat, serta mengurus segala bentuk persuratan. Fokus dan tanggung jawabnya adalah kerapian data, komunikasi internal, dan pengarsipan. Bendahara bertugas atas Mencatat arus kas masuk/keluar harian, menyusun dan melaporkan kondisi keuangan secara berkala. Fokus dan tanggung jawabnya transparansi finansial, pembukuan, dan keamanan dana. Bagian Pemasaran memiliki tugas Bertanggung jawab atas semua aspek yang berkaitan dengan pemasaran dan promosi produk. Fokus dan tanggung jawabnya Terlibat langsung dalam kerjasama dengan supermarket maupun konsumen secara langsung. Anggota pengurus KWT memiliki tugas berpartisipasi aktif dalam kegiatan produksi/layanan yang dimiliki, menaati aturan kelompok dan memberikan saran dan inovasinya. Fokus dan tanggung jawabnya produktivitas usaha, kepatuhan, dan dukungan tim.

Seksi Produksi adalah menjalankan proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi sesuai target. Fokus dan tanggung jawabnya adalah Kuantitas, mutu, dan efisiensi waktu pembuatan produk serta memastikan jadwal dan standar kualitas terpenuhi serta mesin berjalan lancar. Seksi Sarana dan Prasarana adalah mengadakan, merawat, dan mengelola seluruh fasilitas serta peralatan kerja. Fokus dan tanggung jawabnya adalah kesiapan alat dan kenyamanan infrastruktur penunjang operasional serta menjaga fasilitas agar tidak rusak,

memperbaiki kerusakan, dan mencukupi kebutuhan alat kerja. Seksi Packing adalah Memeriksa, membungkus, dan memberi label pada produk jadi. Fokus dan tanggung jawabnya adalah Keamanan produk agar tidak rusak saat dikirim dan memastikan produk yang dikemas sudah benar, rapi, dan sesuai standar sebelum dikirim ke pelanggan

Implikasi Organisasi terhadap Peningkatan Ekonomi Desa

Penguatan tata kelola kelembagaan organisasi, seperti yang diimplementasikan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Daon, tidak hanya memperbaiki aspek administrasi secara internal, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap perekonomian desa. Organisasi yang terstruktur membantu warga bertransformasi dari sekadar masyarakat yang hidup di desa (berproduksi untuk kebutuhan sendiri) menjadi pelaku usaha mikro yang terorganisir dan produktif. Dari sudut pandang ekonomi, pengorganisasian kelompok yang baik mampu meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) para anggota. Dengan wadah kelompok, anggota dapat melakukan kegiatan ekonomi secara kolektif, proses produksi, pengemasan, distribusi sampai ke penjualan/pemasaran dilakukan secara bersama masyarakat desa dalam hal ini pengurus/anggota KWT. Efisiensi produksi dan pemasaran ini sangat sulit dicapai jika warga bergerak secara perorangan, artinya proses ekonomi desa jika dilakukan secara gotong royong akan membikan implikasi terhadap tumbuhka ekonomi desa yang mandiri (Nido et al., 2024; L. , & S. F. Wahyuni, 2025; S. , & W. S. Wahyuni, 2023).

Selain itu, tata kelola kelembagaan yang transparan dan tertib administrasi menjadikan organisasi tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat desa. Kelompok yang memiliki peran dan fungsi yang jelas, seperti pembagian tugas, dan pembukuan kas yang rapi dinilai lebih layak dalam menjalan organisasi KWT. Kondisi ini secara praktis memudahkan anggota kelompok untuk menjalankan tugasnya secara jelas tanpa sibuk mengurusi tugas orang lain dan dapat bisa menumbuhkan produksi yang lebih masif dan efektif. keberfungsian organisasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan memiliki peluang dalam memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat desa. Tambahan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha kelompok secara langsung membantu menopang kebutuhan finansial rumah tangga. Ketika ketahanan ekonomi tingkat keluarga ini menguat dan daya beli masyarakat meningkat, hal tersebut akan memicu perputaran roda ekonomi yang lebih cepat di lingkungan desa, sehingga memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi kesejahteraan desa secara keseluruhan (Andika Subandra et al., 2022; Gayatri et al., 2017).

Keberadaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Daon tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas perempuan desa, tetapi juga sebagai organisasi sosial-ekonomi yang berperan dalam mendorong peningkatan ekonomi desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan organisasi melalui penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan gotong royong memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas anggota dalam mengelola usaha secara produktif. Organisasi yang dikelola secara baik mampu menciptakan koordinasi yang efektif, meningkatkan kepercayaan antaranggota, serta memperkuat komitmen kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dan akuntabilitas organisasi berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa (Fadhilah et al., 2024).

Dari perspektif ekonomi desa, penguatan organisasi KWT berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya lokal. Melalui struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terorganisir, anggota dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pedesaan yang dimiliki, tenaga kerja, serta potensi desa yang tersedia di Desa Daon. Kegiatan lainnya yang dilakukan secara kolektif memungkinkan terjadinya kegiatan gotong royong yang

produktif, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan keterampilan anggota dalam teknik produksi maupun pengelolaan hasil olahan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi berfungsi sebagai instrumen penguatan modal sosial yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa (Nido et al., 2024; S. , & W. S. Wahyuni, 2023).

Selain itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kelompok memberikan implikasi positif terhadap keberlanjutan usaha ekonomi desa. Pengelolaan dana yang terbuka mendorong tumbuhnya kepercayaan anggota sehingga partisipasi dalam kegiatan kelompok menjadi lebih tinggi. Tingginya tingkat kepercayaan tersebut merupakan modal sosial yang penting dalam mendukung keberlangsungan program pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mampu memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Manik et al., 2026; Saragih et al., 2025). Lebih lanjut, keberadaan KWT juga memberikan dampak ekonomi pada tingkat rumah tangga. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan hasil potensi desa untuk konsumsi maupun penjualan. Pendapatan tambahan yang diperoleh anggota berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, serta penguatan ketahanan pangan lokal. Dengan demikian, organisasi KWT Desa Daon tidak hanya berperan sebagai sarana pemberdayaan perempuan, tetapi juga sebagai aktor pembangunan ekonomi desa yang mendukung terciptanya kemandirian masyarakat berbasis potensi lokal.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa implikasi organisasi terhadap peningkatan ekonomi desa terletak pada kemampuannya membangun modal sosial, memperkuat kapasitas anggota, meningkatkan produktivitas usaha, serta menciptakan tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Semakin kuat kapasitas organisasi KWT Desa Daon, semakin besar pula kontribusinya dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Andika Subandra et al., 2022).

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Daon telah terlaksana dengan baik dan mencapai luaran yang ditargetkan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui pendampingan workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD), hasil nyata yang diperoleh dari pendampingan ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman secara signifikan di kalangan pengurus dan anggota KWT mengenai pentingnya tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, kegiatan ini secara konkret telah menghasilkan draf susunan struktur organisasi KWT yang baru dan definitif, lengkap dengan kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) bagi masing-masing pengurus. Kesepakatan bersama terkait perbaikan administrasi dan keterbukaan pengelolaan kas yang dihasilkan selama FGD terbukti mampu menumbuhkan kembali rasa memiliki (*sense of belonging*) serta kepercayaan antaranggota, yang menjadi fondasi dasar bagi kesiapan kelompok untuk mengelola program produktif ke depannya.

Berdasarkan capaian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut. Pertama, kepada Pengurus KWT Desa Daon diharapkan untuk terus menjaga konsistensi penerapan kelengkapan struktur dan pelaporan keuangan rutin yang telah disepakati. Kedua, Pemerintah Desa direkomendasikan untuk menjalin sinergi yang lebih erat guna memfasilitasi kelembagaan KWT yang kini telah terorganisasi dengan baik agar dapat menjadi mitra strategis BUMDes. Ketiga, bagi akademisi atau program PkM selanjutnya, diperlukan pendampingan tahap

lanjutan (hilirisasi) yang berfokus pada peningkatan kualitas produk (pengemasan, legalitas/PIRT, sertifikasi halal) dan pelatihan *digital marketing* untuk dapat mengukur dampak perluasan pasar secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Al Nido, R., Rili Windiasih, Adhi Iman Sulaiman, Krismiwati Muatip, & Lilik Kartika Sari. (2024). Model pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) melalui modal sosial untuk menjaga kohesivitas kelompok. *Agrivet : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Dan Peternakan (Journal of Agricultural Sciences and Veteriner)*, *12*(1), 117–132. https://doi.org/10.31949/agrivet.v12i1.10088

aljihad, ali, & wibowo, arif. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Pembangunan Manusia (JPM)*, *3*(2). https://doi.org/10.7454/JPM.V3I2.1035

Andika Subandra, Usdeldi, & Eri Nofriza. (2022). Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal of Applied Accounting And Business*, *4*(2), 40–47. https://doi.org/10.37338/jaab.v4i2.18

Christin, M., & Rahayu, L. (2017). Kritik Sosial Pada Media Sosial (Analisis Semiotika Pada Youtube "TV, Jasamu Tiada…"). *J-IKA*, *4*(1), 36–46. https://doi.org/10.31294/KOM.V4I1.1789

Kab.Tangerang. (2025, April 18). *Tangani Kemiskinan Ekstrem, DPKP Kabupaten Tangerang Bentuk Kelompok Ekonomi Petani di 10 Desa*. https://tangerangkab.go.id/detail-berita/tangani-kemiskinan-ekstrem-dpkp-kabupaten-tangerang-bentuk-kelompok-ekonomi-petani-di-10-desa

Doss, C., Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., & Theis, S. (2018). Women in agriculture: Four myths. *Global Food Security*, *16*, 69–74. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.10.001

Fadhilah, D. S. A., Utomo, H., & Riyanti, B. (2024). Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Desa. *ProBank*, *9*(2), 231–244. https://doi.org/10.36587/probank.v9i2.1859

Farnworth, C. R. , J. T. , & L. K. (2023). The role of women's agricultural groups in rural micro-enterprise development in Southeast Asia. Journal of Rural Studies. *Journal of Rural Studies*, 112–124.

Gayatri, G. (Gayatri), Latrini, M. Y. (Made), & Widhiyani, N. L. (Ni). (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *10*(2), 228250. https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.V10.I02.P07

Hermawan, H. (2025). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Subang. *Jurnal Pustaka Dianmas*, *5*(2), 246–255. https://doi.org/10.32509/DIANMAS.V5I2.6628

Islami, D. I. (2024). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Atas Promosi Kuliner Lokal. *Jurnal Pustaka Dianmas*, *4*(2), 89–94. https://doi.org/10.32509/DIANMAS.V4I2.5010

Islami, I., & Sungkono, N. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Jampang Melalui Pelatihan Komunikasi Efektif Berbasis Kearifan Lokal Dan Potensi Wisata. *Jurnal Pustaka Dianmas*, *4*(1), 17–22. https://doi.org/10.32509/DIANMAS.V4I1.4339

Jatnika, D. C., Burhanudin, M., Budiarti Santoso, M., & Septiyanti, S. P. (2024). Empowerment Theory and Digital Village: Insights from West Java's Digital Village Programme. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *5*(3), 227–245. https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.623

Lestari, R. D., Novitaningrum, R., & Ardiyanto, M. (2023). Penguatan Kelembagaan Melalui Penerapan Administrasi Berbasis Digital Pada Kelompok Tani Organik Mbrendel Mekar Kabupaten Karanganyar. *Agrimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Pertanian*, *2*(2), 56–65. https://doi.org/10.25047/AGRIMAS.V2I2.33

Manik, Y. R., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2026). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, *8*(1), 50–59. https://doi.org/10.26905/J.BIJAK.V8I1.16847

Monica, D. D., & Ratna, E. (2023). Implementasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Hukum*, *39*(1), 102–114. https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30749

Mulyanah, A., Somba Siahaan, A., Firdausatul Mukaroma, N., Purnaningsih, N., Wanita Tani, K., Author, C., Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, D., Pertanian Bogor, I., Fakultas Ekologi Manusia, G., & Kamper, J. (2025). Penguatan Kelembagaan Kelompok Wanita Tani dalam Mendorong Perekonomian Keluarga Petani. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(3), 535–546. https://doi.org/10.31960/CARADDE.V7I3.2597

Nido, R. Al, Windiasih, R., Sulaiman, A. I., Muatip, K., & Sari, L. K. (2024). Model pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) melalui modal sosial untuk menjaga kohesivitas kelompok: Indonesia. *Agrivet : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Dan Peternakan (Journal of Agricultural Sciences and Veteriner)*, *12*(1), 117–132. https://doi.org/10.31949/AGRIVET.V12I1.10088

Nilamsari, N., Arief, M., Agung, N., Ardhoyo, W., & Santoso, Y. (2024). Penguatan Komunikasi Kelompok untuk Program Kampung Ramah Lingkungan Desa Jampang Bogor Jawa Barat. *Jurnal Pustaka Dianmas*, *4*(2), 114–121. https://doi.org/10.32509/DIANMAS.V4I2.5009

Pratiwi, A. , H. A. , & Y. D. (2023). Analisis Tata Kelola Kelembagaan pada Kelompok Tani Mandiri di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, *7*(1), 112–125.

Quisumbing, A. R. , M.-D. R. , & N. J. (2021). Women's empowerment and rural micro-entrepreneurship: Evidence from agricultural cooperatives. *World Development*.

Rahman, A. , & P. D. (2021). Transformasi Kelembagaan Kelompok Tani Menuju Korporasi Pertanian Skala Mikro di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, *5*(3), 745–758.

Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(1), 40–48. https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48

Rusli, D., Permadi, C. Z., & Haryono, D. (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kelurahan Kahuripan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *3*(04), 515–528. https://doi.org/10.59141/JISS.V3I04.565

Saragih, M. A. J., Sari, E. N., & Irfan, I. (2025). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik. *Mandiri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(3), 73–86. https://doi.org/10.59086/jak.v3i3.644

Sugiarti, T. , & A. S. A. (2022). Optimalisasi Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Potensi Desa. *Jurnal Penyuluhan*, *18*(1), 85–97.

Suprihandari, M. D., Purnomo, T., & Sanggarwati, D. A. (2025). Creative Economic Innovation In The Sustainable Fashion Industry Through The Utilization Of Scrap Fabric. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, *18*(1), 578–590. https://doi.org/10.46306/JBBE.V18I1.732

Suryani, N. , & R. A. (2021). Dinamika Kelompok dan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Wanita Tani di Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, *17*(2), 210–221.

Wahyuni, L. , & S. F. (2025). Penguatan modal sosial Kelompok Wanita Tani (KWT) mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan di Kota Dumai. *Jurnal Niara*, *18*(12), 1–15.

Wahyuni, S. , & W. S. (2023). Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Kelompok Wanita Tani untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*, *7*(2), 145–156.